BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan merupakan industri yang dapat memberikan manfaat ekonomi tinggi. Penggalan terhadap sumber-sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sumber keuangan Negara. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam ini lebih dikenal dengan mineral dan batubara (minerba). Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara¹ untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.²

Bab III Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 4 ayat (2) menyatakan “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”.

¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2), menjelaskan Hak menguasai oleh Negara memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Menimbang huruf “a”.

Pengaturan merupakan usaha dari negara untuk mengatur (menyusun) dan mengurus bahan-bahan galian yang terdapat di dalam perut bumi Indonesia. Pemberian izin merupakan usaha negara untuk memberikan izin kepada perorangan dan atau badan hukum dalam rangka pengusahaan bahan galian. Pembinaan merupakan usaha, tindakan dari negara dalam rangka pengusahaan bahan-bahan galian sehingga dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Sementara itu, pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh negara atas pelaksanaan kegiatan pengusahaan bahan galian.³

Pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam pada sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pertama kali diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Selanjutnya disebut UU Pertambangan). Dalam undang-undang ini, pertambangan mineral dan batubara diatur melalui kuasa pertambangan, kontrak atau perjanjian.⁴ Pertambangan dengan skala besar diatur oleh negara, bentuk pemberian hak kepada perusahaan dilakukan melalui Kontrak Karya (Selanjutnya disebut KK) dan Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (Selanjutnya disebut PKP2B), sedangkan pertambangan mineral dan batubara dengan skala kecil diatur oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan dijalankan melalui Kuasa Pertambangan (Selanjutnya disebut KP).

³ Salim HS., 2005, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.49

⁴ Ahmad Redi, 2017, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara, Grafika Offset, Jakarta, hlm. 26

Bentuk kontrak dan izin memiliki suatu perbedaan mendasar, yakni dalam kontrak, pemerintah dan perusahaan tambang merupakan dua pihak yang sejajar, sedangkan bentuk izin menempatkan posisi pemerintah lebih tinggi di atas pihak perusahaan pemegang izin. Perubahan paradigma ini menimbulkan perbedaan pendapat khususnya antara perusahaan pemegang KK dengan pemerintah, yakni: Pertama, pemegang KK beranggapan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana karakteristik perjanjian dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata),⁵ yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas *pacta sun servanda*). Sebagai konsekuensinya, hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian tersebut.⁶

Prinsip pengelolaan sumber daya alam dalam suatu perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan tambang harus mencerminkan perbuatan tiap-tiap pihak yang saling memberi manfaat bagi para pihak, baik pada saat kontrak dibuat maupun pada masa yang akan datang. Perbuatan mana harus mencerminkan kualitas etis suatu perbuatan yakni tercapainya tujuan

⁵ Pasal 1338 KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. (KUHPerd. 751, 1066, 1243 dst., 1266 dst., 1335 dst., 1363, 1603, 1611, 1646-3?, 1688, 1813.)”

⁶ Ridwan Khairandy, 2015, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Etik Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, FHUIIPress, Yogyakarta, hlm. 38.

perbuatan yang tidak merugikan kepentingan bangsa dan negara. Untuk mengakomodir perkembangan hukum terhadap eksploitasi pertambangan maka pada tanggal 12 Januari 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia telah memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti serta mencabut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Untuk dapat melaksanakan usaha di bidang pertambangan, badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perorangan maupun masyarakat setempat harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)⁷ yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing.

Sebagai perpanjangan tangan dari UU Minerba, pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang wilayah pertambangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Selanjutnya disebut juga Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010). Pengertian Wilayah Pertambangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan adalah: “Kawasan yang memiliki potensi mineral dan atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan”. Untuk dapat

⁷ Izin Usaha Pertambangan atau disebut juga IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

mengelola wilayah pertambangan tersebut sebagaimana disebut dalam UU Minerba Bab VII tentang izin usaha pertambangan, maka setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penambangan memerlukan adanya izin usaha pertambangan. Hal ini dikarenakan pertambangan merupakan salah satu bagian dari bidang pertanahan yang membutuhkan jaminan kepastian hukum khususnya dalam hal kepemilikan wilayah pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangan. Adanya kepastian hukum tersebut adalah dalam rangka melindungi pihak pemegang hak wilayah pertambangan atau wilayah usaha pertambangan terhadap gangguan-gangguan dari sesama pengusaha pertambangan maupun dari penguasaan sekalipun. Ketegasan bahwa harus adanya izin tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 10 yang menyebutkan pengertian wilayah izin usaha pertambangan sebagai berikut: “Wilayah

yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.” Dalam perusahaan mineral dan batubara, badan swasta di Indonesia lazimnya melaksanakan dengan melalui perusahaan berbentuk perseroan terbatas, dimana permodalannya seluruhnya terdiri atas saham. Adapun saham adalah merupakan benda bergerak dan memiliki sifat yang dapat dialihkan (*transferable*).⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain sebagai hukum dasar bidang politik juga merupakan hukum dasar di bidang

⁸ Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ekonomi (*economic constitutional*) dan juga sosial (*social constitutional*).⁹

Dalam batang tubuh Konstitusi, pengaturan tentang hukum dasar bidang ekonomi terdapat dalam Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan “Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” kemudian pasal 33 Ayat (3) menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁰

Karakteristik pertambangan adalah *non-renewable* (tidak dapat diperbaharui), mempunyai resiko lebih tinggi dan pengusahaannya memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan komoditi lain pada umumnya.¹¹ Usaha bidang pertambangan adalah jenis usaha yang memerlukan banyak modal, peralatan dan teknologi, serta penuh dengan risiko baik risiko hukum ataupun risiko kerugian secara finansial atau risiko investasi. Untuk menghadapi tantangan serta risiko usaha ini, maka akuisisi/pengambilalihan perseroan pemegang IUP atau pengalihannya sampai dengan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut adalah suatu hal yang sangat mungkin dilakukan pengusaha atau investor di bidang pertambangan mineral dan batubara. Hal ini juga dibenarkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

⁹ Jimly Asshiddique, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta. “Sepanjang corak muatan yang diaturinya, UUD 1945 mendekati tradisi penulisan konstitusi di negara-negara sosialis seperti USSR, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia dan Hongaria, yang menempatkan konstitusi disamping sebagai hukum dasar politik, juga merupakan hukum dasar bidang ekonomi (*economic constitutional*) dan sosial (*social constitutional*)”

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan (3).

¹¹ Arief Budimanta, *Menuju Pertambangan yang Berkelanjutan di Era Desentralisasi*, Penerbit ITB, Bandung, 2010, hal. 1.

terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.”

Akan tetapi, perbuatan pengalihan saham ini merupakan perbuatan korporasi (*corporate action*) yang dimanfaatkan sebagian kalangan sebagai jalan pintas untuk mencari keuntungan dengan menjadikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai komoditas untuk diperjual-belikan. Fenomena IUP sebagai komoditi ini kemudian menjadi salah satu latar belakang sosial yang mewarnai diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba), yang mengatur secara eksplisit ketentuan tentang pengalihan kepemilikan dan/atau saham perusahaan pemegang IUP. Undang-Undang ini secara lengkap memberikan arahan dan batasan dalam Pasal 93 :

Ayat (1) “Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.”

Ayat (2) “Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.”

Ayat (3) “Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan

- b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berawal dari dalih ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat beberapa Kepala Daerah yang dengan mudah memberikan/mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan sering tidak melalui prosedur yang seharusnya sehingga mengakibatkan konflik antara pemegang izin usaha pertambangan yang pertama dengan pemegang izin usaha berikutnya yang tumpangtindih, maupun konflik antara pemegang izin usaha pertambangan dengan masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Izin pertambangan yang dikeluarkan dengan tidak melalui prosedur yang seharusnya tersebut telah melanggar hak pemegang Izin Usaha Pertambangan yang pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba, Pasal 90 s/d Pasal 94, bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada otonomi daerah, tanggung jawab Kepala Daerah langsung kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri merasa tidak memiliki kompetensi teknis dalam hal mengawasi dan mengendalikan kebijakan dan keputusan administrasi negara Pemerintah Daerah. Proses pelimpahan wewenang dalam pengurusan perizinan terhadap sektor sumberdaya alam tidak dibarengi dengan mekanisme pengendalian terhadap kewenangan pengurusan izin.

Lemahnya pengawasan dan pengendalian perijinan oleh Pusat kepada pemberian izin memberikan celah bagi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam.

Di Indonesia sumber sengketa wilayah tambang pada umumnya berawal dari dikeluarkannya izin oleh pemerintah daerah. Kekhawatiran investor terjadi karena situasi hukum dan politik yang tidak menentu. Investor yang menanamkan modal di Negara-negara berkembang seperti Indonesia umumnya menuntut kesiapan Negara tersebut dari aspek keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi.¹² Sebagai contoh salah satu kasus yang dapat menyebabkan kekhawatiran bagi investor, baik investor dalam negeri ataupun luar negeri yaitu kasus izin di wilayah pertambangan, salah satunya di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dimana PT. Pasir Prima Coal Indonesia (selanjutnya disingkat PT. PPCI) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha terkait dengan putusan Bupati Penajam Paser Utara No 460/63/Distamben/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara nomor 545/03 - Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batu Bara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia. Pada Keputusan Bupati tanggal 7 Pebruari 2011 tersebut salah satu dasar dicabutnya Surat Izin Kuasa Pertambangan adalah terjadi perubahan Direktur Utama

¹²Camelia Malik, "Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia", artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, (Juli-September 2007), hal. 16

dimana perubahan tersebut belum mendapatkan persetujuan oleh Menteri.

Sayangnya dalam kasus di atas Pemerintah sebelum melakukan pencabutan Kuasa Pertambangan PT PPCI tidak mempertimbangkan aspek hukum akuisisi atau pengalihan saham dalam hukum perseroan terbatas. Akuisisi merupakan perbuatan hukum internal dari suatu badan hukum korporasi. Perbuatan ini tidak perlu mendapatkan persetujuan menteri, tetapi perbuatan hukum ini harus dilaporkan kepada menteri dan harus dimasukkan dalam daftar khusus sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi peristiwa hukum ini tidak sama dengan peristiwa pemindahan hak atas saham atau pengalihan kepemilikan saham di pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Akibat Hukum Akuisisi Perusahaan Pemegang IUP Yang Belum Mendapatkan Persetujuan Pemerintah terhadap Peralihan dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan.*

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang tersebut di atas, diperoleh permasalahan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum akuisisi perusahaan pemegang IUP yang belum mendapatkan persetujuan Pemerintah terhadap Peralihan dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum perusahaan yang mengakuisi perusahaan pemegang IUP?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui akibat hukum akuisisi perusahaan pemegang IUP yang belum mendapatkan persetujuan Pemerintah terhadap Peralihan dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum perusahaan yang mengakuisi perusahaan pemegang IUP.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah melahirkan temuan-temuan secara ilmiah. Oleh karena itu, hasil setiap penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Pada dasarnya, ada dua macam manfaat yang akan diberikan, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam

bidang pertambangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang wilayah ijin usaha pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum pihak pemegang ijin usaha pertambangan yaitu penerapan asas efisiensi yang mana nantinya akan disusun dalam bentuk tesis untuk memenuhi syarat meraih gelar Magister. Penulisan ini bermanfaat bagi notaris sebagai pengetahuan karena notaris berperan juga sebagai pejabat umum membuat akta dalam menjalankan profesinya yaitu sebagai pembuat akta pendirian perusahaan dan akta perjanjian.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah *Akibat Hukum Akuisisi Perusahaan Pemegang IUP Yang Belum Mendapatkan Persetujuan Pemerintah Daerah terhadap Peralihan dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan*. Penelitian ini merupakan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Masalah perlindungan hukum terhadap pemegang ijin usaha pertambangan merupakan pembahasan yang menarik dan sudah banyak penulis dalam penelitian terdahulu yang membahasnya. Sepanjang penulisan persiapan tesis ini, telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan masalah ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Karyawati, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alumni Angkatan 2007/2008 dengan judul “Analisis Peranan Notaris dalam Pembuatan Klausul Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Menjalankan Kegiatan Usaha di Bidang Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam” dalam penelitian ini yang dibahas adalah peranan pejabat umum Notaris dalam pembuatan klausul CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial perusahaan bidang sumber daya alam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Dimas pada program Pascasarjana Universitas Mulawarman Samarinda pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara” dalam penelitian ini yang dibahas adalah tentang isu konflik ganti rugi lahan dan konflik penegakan hukumnya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Setiap makalah ilmiah termasuk makalah hukum dan proposal penelitian hukum harus memiliki kerangka teoritis dan konseptual. Kerangka teoritis diperlukan sebagai alat untuk melakukan pengujian atau analisis terhadap postulat-postulat yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan kerangka konseptual merupakan definisi operasional dari istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*¹³.

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.¹⁴ Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah

¹³H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 259.

¹⁴Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 79.

mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.

Gustav Radbruch mengelompokkan teori kepastian hukum ke dalam dua bentuk, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum itu sendiri.¹⁶ Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus berhasil menjamin kepastian ada setiap simpul kemasyarakatan. Kepastian hukum dapat terwujud bila ketentuan-ketentuan dalam hukum tersebut tidak bertentangan satu sama lainnya dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah yang bisa ditafsirkan berbeda-beda.¹⁷

Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 85.

¹⁶ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Ichtrar*, Jakarta, 1957, hlm. 22-23.

¹⁷ Ibid

Peter Mahmud Marzuki melihat kepastian hukum tidak hanya pada pasal-pasal dalam undang-undang, namun terletak pada konsistensi berbagai peraturan tersebut (tidak boleh bertentangan) termasuk dalam putusan hakim.¹⁸ JM Otto menilai indikator kepastian hukum terlihat apabila memenuhi syarat:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent an dimpartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁹

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 7, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 158.

¹⁹Sulistiyowati Irianto dkk, *Kajian Sosio Legal*, Jakarta, Pustaka Larasan, 2012, hlm. 122-123.

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 157-158

kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.²¹ Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

c. Teori Efektivitas Hukum

Adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor - faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah : “Apakah orang - orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi^{.22}. Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan - perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan.

Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 159-160

²² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.39.

dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan Keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) kemanjuran; kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan)²³.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul penelitian yang diangkat, yakni :

a. Wilayah Izin Usaha

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) merupakan tahap awal dari setiap tahapan yang wajib dipenuhi bagi setiap pemohon Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. WIUP adalah wilayah dengan luas batas tertentu yang berada wilayah usaha pertambangan (WUP) yang diberikan kepada pemegang IUP²⁴.

b. Pertambangan

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.801.

²⁴ <http://asevysobari.blogspot.com/2016/06/wilayah-izin-usaha-pertambangan>, diakses 8 September 2018, pukul 02.39 wib.

adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada konsep pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yang meliputi: *prospecting* (penyelidikan umum), eksplorasi, studi kelayakan, persiapan produksi, penambangan, reklamasi dan pengelolaan lingkungan, pengolahan (*mineral dressing*), pemurnian, pemasaran, dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) serta pengakhiran tambang (*mine closure*).

c. **Gugatan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan. Menurut Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai kedudukan persoalan, dengan kata lain, dasar gugatan harus dikemukakan secara jelas. Dalam hukum acara perdata, bagian gugatan ini disebut dengan *fundamenteum petendi* atau *posita*. Suatu *posita* terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan

berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum²⁵.

d. **Perseroan Terbatas**

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan saja tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya (para pemegang saham), didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai Badan Hukum, PT dianggap layaknya perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan²⁶.

G. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sebagai suatu karya ilmiah, tesis harus dilakukan dengan metodologi penelitian yang tepat, guna membantu penulis untuk menemukan, merumuskan, atau menganalisa dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Adapun

²⁵ Heniy Astianto dan Ismantoro Dwi Yuwono, *Buku Strategi dan Konsultasi Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 61

²⁶ Winarti, *205 Pertanyaan Tentang PT, CV, Persero dan Badan Usaha Lainnya*, Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2012, hlm.2

metode penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya. Yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap praktiknya.

Dalam pendekatan ini sebenarnya bagaimana menemukan *law in action* dari suatu peraturan sehingga perilaku yang nyata dapat diobservasi sebagai akibat diberlakukannya hukum positif dan merupakan bukti apakah telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang).²⁷

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 132

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan atau norma-norma yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum pemegang wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP). Sedangkan aspek empirisnya adalah praktek pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang wilayah ijin usaha pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui penelitian untuk mengumpulkan data obyektif yang merupakan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yang berarti penelitian ini menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai segala sesuatu atau sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu, lalu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Bersifat analitis mengandung makna yaitu mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang wilayah ijin usaha pertambangan.

3. Jenis Data

Dalam setiap penelitian hukum, data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum adalah data primer dan data sekunder.²⁸ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden

²⁸ *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2012, hlm. 7.

melalui wawancara atau interview dan penyebaran angket, sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung.²⁹

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan atau digunakan hanya data sekunder, yang terdiri dari:³¹

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);
 - d) Recht Reglement Buiten Gewesten (RBg);

²⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalamania Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1982, hlm. 52

³¹Ibid, hlm. 35.

- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;
 - f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 - g) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - h) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - i) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - k) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Kementerian Negara;
 - l) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum primer seperti buku-buku, majalah, journal, literatur dan dokumen yang berasal dari KPKNL Pekanbaru yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi Hak Tanggungan
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, dimana dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Penarikan sampling merupakan proses dalam memilih suatu bagian populasi dan populasi yang ditunjuk adalah subjek yang ditunjuk sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan data digunakan adalah teknik purposive sampling, yang dimaksud dengan purposive bahwa pengambilan sampel tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data dari lokasi yang luas dengan responden yang banyak, dengan keterangan jawaban yang banyak, tetapi dengan keterangan berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum). Jadi walaupun lokasinya terbatas, respondennya sedikit, dan jika data yang diperoleh itu merupakan kenyataan yang berlaku, maka data tersebut sudah cukup membuktikan kebenarannya.³²

³²Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 99.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan disusun secara lengkap, sistematis, benar, dan konsisten. Data tersebut kemudian dianalisis dengan cara menganalisis keadaan dan fakta yang ada berdasarkan teori-teori yang dikaitkan dengan masalah yang diteliti dan mempelajari apa yang dinyatakan responden baik secara lisan maupun secara tertulis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai karya ilmiah yang tentunya disesuaikan dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah. Oleh sebab itu penulis telah menyiapkan suatu sistematika penulisan tesis untuk dapat memahami keseluruhan isi dari penulisan tersebut.

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Hal ini dimaksudkan memudahkan dalam memahami penulisan hukum tersebut. Adapun sistematika yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; keaslian penelitian; kerangka teori dan konseptual; metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan dan tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan. Teori-teori umum ini merupakan kumpulan pendapat para ahli di bidang hukum

perusahaan dan hukum perjanjian atau merupakan bahan dari hasil penelitian sebelumnya. Bab tinjauan pustaka ini meliputi: Tinjauan Umum tentang pertambangan umum Indonesia; tentang perizinannya, dan tentang penyelesaian sengketa bidang tambang.

BAB III : Bab Pembahasan yang menguraikan tentang rumusan masalah yang pertama yaitu akibat hukum terhadap perusahaan pemegang IUP apabila terdapat perubahan pengurus perseroan sebagaimana perubahan tersebut belum mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Daerah. Bab ini merupakan pembahasan mengenai landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku proses guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB IV : Bab Pembahasan yang menguraikan tentang rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana perlindungan terhadap investor apabila IUP dicabut oleh Kepala Daerah dalam hal ini studi hukum terhadap pencabutan IUP PT. Pasir Prima Coal Indonesia?. Bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisis penulis terhadap permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan landasan teori guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB V : Bab Penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan; dan saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut.